



IDN/ANTARA

PERTEMUAN PRESIDEN AS DENGAN PM SWEDIA DAN PRESIDEN FINLANDIA

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinistö berjalan di Colonnade menuju Ruang Oval di Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Kamis (19/5).

Pasukan Ukraina yang Menyerah di Mariupol Dijadikan Tawanan Perang Rusia

Lebih dari 1.700 pejuang Ukraina di pabrik baja Azovstal di Mariupol telah menyerah sejak Senin (16/5) lalu.

KIEV(IM) - Nasib ratusan pejuang Ukraina yang menyerah setelah bertahan melawan gelombang serangan Rusia di pabrik baja Mariupol tergantung pada keseimbangan kondisi.

Muncul pula kekhawatiran dunia internasional bahwa Rusia mungkin melakukan pembalasan terhadap para tahanan.

Komite Palang Merah Internasional mengumpulkan informasi pribadi dari ratusan tentara nama, tanggal lahir, kerabat terdekat dan mendaftarkan mereka sebagai tawanan perang, sebagai bagian dari perannya dalam memastikan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang di bawah Kon-

vensi Jenewa.

Amnesty International mengatakan dalam sebuah tweet, bahwa tentara Ukraina sekarang menjadi tawanan perang karena itu “tidak boleh mengalami segala bentuk penyiksaan atau perlakuan buruk.”

Lebih dari 1.700 pejuang Ukrain di pabrik baja Azovstal di Mariupol telah menyerah sejak Senin (16/5).

Ini tampaknya merupakan tahap terakhir dalam pengepungan hampir tiga bulan di kota pelabuhan yang sekarang hancur itu. Setidaknya beberapa pejuang dibawa oleh Rusia ke bekas koloni hukuman di wilayah yang dikuasai

oleh separatis yang didukung Moskow.

Lainnya dirawat di rumah sakit, menurut seorang pejabat separatis. Tetapi sejumlah yang dirahasiakan tetap berada di gudang bunker dan terowongan di pabrik yang luas itu.

Dalam pesan video singkat, wakil komandan Resimen Azov, yang memimpin pertahanan pabrik baja, mengatakan dia dan pejuang lainnya masih berada di dalam. “Sebuah operasi sedang berlangsung, rincian tidak akan saya umumkan,” kata Svyatoslav Palamar, seperti dikutip dari AP.

Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan dia bekerja untuk memastikan “bahwa pasukan internasional yang paling berpengaruh diberi tahu sebanyak mungkin, terlibat dalam menyelamatkan pasukan kita.”

Sementara Ukraina menyatakan harapan untuk

pertukaran tahanan, pihak berwenang Rusia telah ngecankam untuk menyelidiki beberapa pejuang Azovstal atas kejahatan perang dan mengadili mereka, mencaup mereka “Nazi” dan penjajah.

Asal-usul sayap kanan Resimen Azov telah dimanfaatkan oleh Kremlin sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan invasi Rusia sebagai pertempuran melawan pengaruh Nazi di Ukraina. Menguasai pabrik baja Azovstal akan memungkinkan Rusia untuk mengklaim kendali penuh atas Mariupol dan mengamankan kemenangan yang telah lama dicari.

Tetapi, itu akan menjadi kemenangan simbolis sebagian besar pada saat ini, karena kota itu sudah secara efektif berada di tangan Moskow.

Pasukan Kiev, yang didukung oleh senjata Barat, menggagalkan tujuan awal Rusia

untuk menyerbu ibukota, Kiev, dan telah melakukan perlawanan keras terhadap pasukan Moskow di Donbas, kawasan industri timur yang ingin direbut oleh Presiden Vladimir Putin.

Mykhailo Podolyak, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang terlibat dalam beberapa putaran pembicaraan dengan Rusia, mengatakan dalam sebuah tweet yang ditujukan ke Moskow: “Jangan tawarkan kami getatan senjata – ini tidak mungkin tanpa penarikan total pasukan Rusia.” “Sampai Rusia siap untuk memasukkan membebas-

kan wilayah yang diduduki, tim perunding kami adalah senjata, sanksi, dan uang,” tulisnya. Rusia, bagaimanapun, sekali lagi mengisyaratkan niatnya untuk memasukkan atau setidaknya mempertahankan pengaruh atas wilayah yang telah direbut pasukannya. ● tom

Rusia, bagaimanapun, sekali lagi mengisyaratkan niatnya untuk memasukkan atau setidaknya mempertahankan pengaruh atas wilayah yang telah direbut pasukannya. ● tom

Taliban Perintahkan Presenter TV Perempuan Afghanistan Tutup Wajahnya Saat Siaran

KABUL(IM) - Taliban memerintahkan presenter perempuan di TV untuk menutupi wajahnya ketika tengah siaran.

Dekrit tersebut disebar ke media Afghanistan pada Kamis (19/5).

Peraturan tersebut dikeluarkan dua pekan setelah perempuan Afghanistan diperintahkan menggunakan cadar di depan umum.

Mereka akan mendapat-

kan risiko hukuman jika tidak memenuh perintah itu.

Salah seorang jurnalis Afghanistan yang bekerja di TV lokal di Kabul, yang tak mau namanya disebut mengatakan dirinya kaget mendengar perintah tersebut. “Mereka memberikan tekanan tidak secara langsung untuk berhenti membawa acara di TV,” katanya kepada BBC.

“Bagaimana Saya bisa membaca berita dengan mu-

lut tertutup? Saya tak tahu apa yang harus sekarang dilakukan.

Saya harus bekerja. Saya adalah pencari nafkah di keluarga,” ujarnya.

Menurut seroang Juru Bicara Kementerian Taliban untuk Pencegahan Kejahatan dan Promosi Kebajikan, dekrit itu akan mulai efektif diberlakukan pada Sabtu (21/5).

Juru bicara tersebut mengungkapkan dekrit itu sebagai saran, dan tak jelas apa yang

akan terjadi jika tak dijalankan.

Keputusan itu dikritik secara luas di Twitter, dengan banyak yang menyebutnya sebagai langkah lainnya dari Taliban mempromosikan ekstrimisme.

“Dunia memerintahkan menggunakan masker untuk melindungi orang dari Covid. Taliban paksa menggunakan masker untuk melindungi orang dari melihat wajah jurnalis perempuan. Bagi Taliban, perempuan adalah penyakit,”

cuit salah satu aktivis.

Taliban memang kerap menekan hak-hak perempuan, khususnya pada masa pertama mereka berkuasa pada awal 1990-an.

Mereka memaksa perempuan untuk menggunakan burka. Sejak kembali berkuasa pada Agustus lalu, Taliban kembali mulai membatasi hak-hak perempuan untuk bekerja dan mendapat pendidikan. ● ans

Raja Yordania Batasi Pergerakan Mantan Pewaris Takhta

AMMAN(IM) - Raja Yordania Abdullah II mengatakan pada Kamis (19/5), membatasi pergerakan saudara tirinya Pangeran Hamzah dan membatasi kontakannya dengan dunia luar. Tindakan ini untuk memastikan dia tidak bertindak bertentangan dengan kepentingan negaranya.

Hamzah yang merupakan mantan pewaris takhta Yordania ditempatkan di bawah tahanan rumah tahun lalu. Dia dituduh pada April 2021 mencaoba mengacaukan monarki dalam rencana yang diilhami asing, tetapi terhindar dari hukuman setelah berjanji setia kepada Raja.

Sebuah pernyataan pengadil kerajaan mengatakan Raja telah menyetujui rekomendasi oleh dewan keluarga kerajaan yang memutuskan pembatasan pergerakan, tempat tinggal, dan komunikasi pangeran yang terasing itu.

Seorang kepala penasihat kerajaan Bassem Awadallah dan seorang anggota kerajaan di bawah umur dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena keterlibatan mereka dalam dugaan plot kudeta.

Pria berusia 42 tahun itu diangkat menjadi Putra Mahkota ketika Raja Hussein meninggal pada 1999 dan Abdullah II menjadi Raja selanjutnya. Tapi, dia kehilangan gelar itu lima tahun kemudian ketika Abdullah II mengangkat putranya sendiri sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Perseteruan itu mengguncang citra Yordania sebagai surga stabilitas di Timur Tengah yang tak terduga. Raja mengatakan dalam sebuah

surat kepada warga Yordania bahwa dia telah melakukan pengendalian diri, toleransi, dan kesabaran sepenuhnya dengan adik tirinya yang tidak pernah menyerah selama bertahun-tahun dari delusi untuk mengambil alih takhta.

Raja Yordania mengatakan, Hamzah sekarang akan kehilangan ruang lingkup untuk memungkinkan menjadi ancaman bagi bagi negaranya, setelah menghabiskan semua kesempatan untuk bertobat. “Kami akan memberi Hamzah semua yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi dia tidak akan memiliki ruang yang pernah dia gunakan untuk menyinggung bangsa, institusinya, dan keluarganya, atau untuk merusak stabilitas Yordania,” katanya.

Orang dalam istana mengatakan bahwa sejak krisis muncul, Hamzah dibiarkan hidup dalam gaya mewah bersama keluarganya di sebuah istana di dalam kompleks kerajaan. Dia pun mendapatkan semua hak istimewa dan tunjangan seorang pangeran, memungkinkan melakukan panggilan internet dan telepon.

Istana marah ketika pangeran yang terasing itu mengumumkan bulan lalu bahwa melepaskan gelar kerajaannya sebagai protes atas kebijakan Yordania saat ini. Istana mengatakan bahwa di bawah hukum keluarga, gelar hanya dapat dicabut oleh raja. Perlawanan Hamzah telah mereda setelah dia mengeluarkan permintaan maaf pada Maret dengan berjanji untuk tidak bertindak melawan kepentingan penguasa Yordania. ● gul

Otoritas Saudi Usut Masalah Karyawan Mal yang Dilarang Duduk Saat Kerja

RIYADH(IM) - Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) Arab Saudi turun tangan untuk mengatasi masalah seorang karyawan wanita Saudi yang dilarang duduk sepanjang jam kerjanya di dalam sebuah mal di ibu kota Riyadh. Warganet pun bersuara dan menyatakan simpatinya kepada wanita itu.

Simpati warganet bermunculan setelah menonton unggahan video di media sosial. Di dalam video yang diunggah sendiri oleh wanita tersebut, seperti dilansir Saudi Gazette, Kamis (19/5) dijelaskan mengenai kondisi kerjanya yang tidak pantas di mal.

Mengetahui hal ini, warganet

menuntut kementerian untuk mengambil tindakan dan segera menyelesaikan masalahnya.

Setelah menjadi viral, otoritas Saudi pun mengambil tindakan setelah menerima laporan, yang disertai klip video di mana karyawan tersebut muncul.

Karyawan wanita itu mengatakan dia berdiri sepanjang jam kerjanya karena tidak diizinkan untuk duduk. Terlepas dari apakah ada pelanggaran atau tidak di fasilitas tersebut.

Pihak MHRSD pun mengonfirmasi mereka telah mulai menyelidiki kasus wanita tersebut. Kementerian juga telah memerintahkan untuk mengambil semua tindakan hukum serta memaksa fasilitas

tersebut untuk menyediakan lingkungan kerja yang sesuai bagi karyawan di dalam mal.

Gagalnya menyediakan kantor atau tempat duduk untuk karyawan yang mengharuskan mereka berdiri selama jam kerja, seperti pekerjaan kantor, layanan pelanggan, akuntan penjualan dan sejenisnya, merupakan pelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan Hukum Perburuhan Saudi.

Dendanya adalah sebesar 5.000 riyal Saudi. Berdasarkan aturan hukum di Saudi, majikan atau penyedia lapangan pekerjaan wajib menyediakan tempat duduk yang layak bagi pekerja perempuan selama mereka melakukan pekerjaannya. ● tom



IDN/ANTARA

FESTIVAL FILM CANNES KE-75 DI FRANCIS

Warga berkumpul untuk pemutaran bioskop tepi pantai saat Festival Film Cannes ke-75 di Cannes, Prancis, Kamis (19/5).

Korut Klaim Berhasil Perangi Covid-19

SEOUL(IM) - Korea Utara mengatakan pada Jumat (20/5) bahwa Seoul mencapai “hasil bagus” dalam memerangi wabah Covid-19 yang pertama dialami negara tersebut. Sementara itu, jumlah warga yang mengalami gejala demam telah melebihi dua juta orang. Negara yang terkucil itu melaporkan ada 263.370 orang lagi yang memperlihatkan gejala demam. “Sehingga jumlah keseluruhan kasus demam hingga Kamis petang mencapai 2.24 juta,” kata kantor berita pemerintah, KCNA.

KCNA juga melaporkan bahwa dua orang meninggal sehingga jumlah total kematian hingga Kamis petang tercatat 65 orang. Korut mengatakan bahwa, kendati ada peningkatan kasus, kegiatan pertanian terus berlangsung, pabrik-pabrik tetap beroperasi. Pemerintah juga tetap berencana menggelar upacara pemakam scorang mantan jenderal.

“Walaupun ada situasi pencegahan epidemi darurat maksimum, produksi di sektor-sektor industri utama tetap berjalan normal dan proyek-proyek konstruksi skala besar terus digenot,” kata KCNA.

“Hasil baik terus dilaporkan dalam perang yang sedang berlangsung melawan epidemi,” kata KCNA, menambahkan.

Peningkatan kasus dan kurangnya sumber daya medis serta vaksin di Korea Utara membuat badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan soal kemungkinan dampak yang “menghancurkan” bagi 25 juta penduduk negara itu.

Para petinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengkhawatirkan keadaan bahwa penyebaran Covid-19 yang tidak terawasi bisa meningkatkan keberadaan varian-varian baru yang lebih mematikan. ● gul

Kasus Gejala Covid-19 di Korea Utara Tembus 2 Juta

PYONGYANG(IM) - Kasus covid-19 yang tengah melanda Korea Utara dilaporkan telah meningkat dengan cepat. Pada Jumat (20/5), pejabat kesehatan Korea Utara melaporkan lebih dari 2 juta orang telah memperlihatkan gejala Covid-19, sejak kasus pertama dilaporkan pekan lalu.

Mereka juga mengungkapkan 63 orang tewas karena Covid-19, dan 740.000 orang telah dikarantina karena memiliki gejala tersebut.

Demam dan suhu tubuh yang tinggi menjadi gejala dari penyakit karena virus korona.

Para pengamat mengungkapkan, nyaris semua rakyat Korea Utara yang tak divaksin Covid-19 membuat peningkatan kasus virus korona di sana kian tinggi. Wabah Covid-19 yang melanda Korea Utara pun membuat rakyat dari negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut ketakutan.

Surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun, menyarankan orang dengan gejala ringan merebus 4 hingga 5 gram, daun Dedalu atau Kamperfuli dengan air panas dan meminumnya tiga kali sehari.

Namun, anjuran tersebut membuat pembelot Korea Utara lainnya, Cho Chung-hui merasa hal itu omong kosong.

“Paudun mereka tak masuk akal. Seperti pemerintah meminta orang untuk meng-

ghubungi dokter hanya jika mereka kesulitan bernapas, yang berarti sebelum mereka akan mati,” kata pembelot yang sebelumnya adalah pejabat pertanian Korea Utara.

“Hati saya sakit ketika saya berpikir tentang saudara dan saudari saya di Korea Utara dan mereka menderita,” ujarnya. ● ans

Ia juga mengungkapkan



IDN/ANTARA

KONDISI DESA MOSHCHUN DI TENGAH INVASI RUSIA

Suasana desa Moshchun yang hancur, di tengah invasi Rusia, Kyiv, Ukraina, Kamis (19/5). Foto diambil dengan drone.

Rusia Usir Puluhan Diplomat Prancis, Spanyol dan Italia Sebagai Tindakan Pembalasan

MOSKOW(IM) - Rusia mengusir puluhan diplomat dari Prancis, Italia, dan Spanyol sebagai pembalasan atas pengusiran diplomat Rusia dari negara-negara Eropa sebagai bagian dari aksi bersama dalam menanggapi perang Rusia di Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengusir 34 “staf misi diplomatik Prancis” di Rusia dan memberi mereka waktu dua minggu untuk meninggalkan negara itu.

Moskow mengeluarkan pengumuman itu setelah memanggil Duta Besar Prancis untuk Rusia, Pierre Levy dan mengatakan kepadanya bahwa pengusiran 41 staf misi diplomatik Rusia adalah “keputusan yang provokatif dan tidak mendasar”, menurut pernyataan itu seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (19/5).

Kementerian itu kemudian menyatakan bahwa 27 staf Kedutaan Besar Spanyol di Moskow dan Konsulat Jenderal Spanyol di Saint Petersburg “telah dinyatakan persona non grata” dan akan memiliki waktu selama tujuh hari untuk meninggalkan Rusia.

Kementerian itu menyatakan kepada Duta Besar Spanyol Marcos Gomez Martinez bahwa pengusiran diplomat Rusia dari Madrid “akan berdampak negatif pada hubungan Rusia-Spanyol”. Spanyol juga mengkritik Rusia atas langkah tersebut.

“Pihak berwenang Rusia membenarkan keputusan ini atas dasar timbal balik untuk

pengusiran 27 pejabat Kedutaan Rusia pada bulan April. Tetapi pengusiran itu didasarkan pada alasan keamanan yang dibenarkan, yang tidak ada dalam kasus ini,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Meskipun tidak ada pernyataan resmi, namun Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova mengkonfirmasi kepada kantor berita Rusia bahwa 24 diplomat Italia juga telah diusir.

Kementerian Luar Negeri Italia juga mengkonfirmasi pengusiran “24 anggota perwakilan diplomatik dan konsuler Italia dan kantor Badan Perdagangan Italia” di Rusia.

Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengutuk keputusan Rusia itu sebagai “tindakan bermusuhan”, tetapi mengatakan saluran diplomatik harus tetap terbuka. “Ini jelas merupakan tindakan bermusuhan; itu juga merupakan reaksi terhadap pengusiran kami,” katanya pada konferensi pers ketika berita pengusiran muncul.

Dia menambahkan: “Yang paling penting adalah bahwa hal itu tidak boleh dengan cara apa pun mengarah pada pengurangan saluran diplomatik karena melalui saluran itulah, jika mungkin, perdamaian [di Ukraina] akan tercapai. Dan itu pasti yang kami inginkan.”

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri di Paris menyatakan Prancis “sangat mengutuk” pengusiran diplomatnya oleh Rusia dan menambahkan bahwa langkah dari Moskow itu “tidak memiliki dasar yang sah.” ● gul